BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

Secara umum koperasi dipahami sebgai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demoktaris.

Pengertian dari koperasi menurut **Kasmir** dalam bukunya **"Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya"** menyatakan bahwa :

> **"Koperasi adalah sekumpulan otonom dari orang-orang yang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan partisipasi-partisipasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki dan bersama-sama mereka kendalikan secara demokratis."**
>
> **(1997:5)**

Pengertian dari koperasi menurut **Tiktik Sartika Pratomo** dalam bukunya **"Ekonomi Skala kecil/Menengah dan Koperasi"** menyatakan bahwa :

> **"Koperasi bisa juga didefinisikan sebagai organisasi yang didirikan dengan tujuan bersama untuk menunjang kepentingan ekonomi para angotanya melalui suatu perusahaan bersama."**
>
> **(2007:4)**

Jadi koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya.

Berdasarkan pengertian tersebut, yang dapat menjadi anggota koperasi yaitu:

1. Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi;
2. Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota koperasi yang memiliki lingkup lebih luas.

Pada Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (Revisi 1998), disebutkan bahwa karateristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain, yaitu anggota koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (biasa disebut Sisa Hasil Usaha atau SHU) biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian dividen berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh si anggota.

2.1.1 Jenis-jenis Koperasi

Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya.

Jenis-jenis Koperasi menurut **UU No. 25 Perkoperasian** adalah sebagai berikut

”1. Koperasi Simpan Pinjam
2. Koperasi Konsumen
3. Koperasi Produsen
4. Koperasi Pemasaran
5. Koperasi Jasa.”

(1992:2)

Pengertian dari koperasi simpan pinjam menurut **Kasmir** dalam bukunya **”Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”** menyatakan bahwa :

”Adalah badan usaha yang dapat dikateorikan sebagai lembaga pembiayaan.”

(2007:270)

Sedangkan pengertian koperasi simpan pinjam menurut **Tiktik Sartika Pratomo** dalam bukunya **”Ekonomi Skala kecil/Menengah dan Koperasi”** adalah :

” Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman.”

(2007:8)

Kegiatan usaha simpan pinjam ini sangat dibutuhkan oleh para anggota koperasi dan banyak manfaat yang diperolehnya dalam rangka meningkatkan modal usaha para anggotanya. Hal itu terlihat akan kenyataan bahwa koperasi yang sudah berjalan pada umumnya juga melaksanakan usaha simpan pinjam.Sehubungan dengan hal tersebut dalam Peraturan Pemerintah ini dimuat ketentuan dengan tujuan agar kegiatan simpan pinjam oleh koperasi tersebut dapat berjalan dan berkembang secara jelas, teratur, tangguh dan mandiri.

Kegiatan usaha simpan pinjam yang diusahakan oleh koperasi ini telah lama dilakukan di Indonesia. Namun demikian, kelengkapan peraturan perundangan dan aturan pendukung lainnya baru memadai ketika UU No. 12 tahun 1967 tentang perkoperasian diperbaharui melalui UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Kemudian ditunjang oleh kehadiran peraturan pemerintah,

yaitu PP No.9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam, serta petunjuk pelaksanaannya di lapangan

Koperasi simpan pinjam secara makro mempunyai peluang yang baik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (anggota) akan jasa pelayanan keuangan yang cepat dan mudah. Berkembangnya suatu KSP pada dasarnya akan sangat bergantung pada kualitas pelayanannya, yang secara umum digambarkan oleh kesehatan koperasinya. Kegiatan usaha simpan pinjam yang diusahakan oleh koperasi ini telah lama dilakukan di Indonesia. Namun demikian, kelengkapan peraturan perundangan dan aturan pendukung lainnya baru memadai ketika UU No. 12 tahun 1967 tentang perkoperasian diperbaharui melalui UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Kemudian ditunjang oleh kehadiran peraturan pemerintah, yaitu PP No.9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam, serta petunjuk pelaksanaannya di lapangan

Atas dasar indikator ekonomi nasional, diantaranya adalah: pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, dan ekspor yang saat ini masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan, maka memberikan gambaran nyata bahwa perekonomian nasional masih belum kondusif bagi upaya dunia usaha mengembangkan usahanya secara utuh dan maksimal. Sejalan dengan kondisi ekonomi Indonesia yang belum kondusif tersebut, sebagian besar lembaga keuangan penyalur kredit terutama perbankan masih belum berani untuk melakukan ekspansi kredit. Kondisi ini tentu sangat menyulitkan bagi sebagian besar kegiatan usaha yang bertahan bahkan mampu untuk berkembang dengan baik terutama dalam upaya menambah modalnya. Kegiatan usaha yang bertahan

dan mampu berkembang pada kondisi ekonomi nasional seperti ini, pada umumnya mempunyai skala usaha kecil dan atau menengah. penyaluran kredit merupakan salah satu pemanfaatan modal dalam bentuk penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak yang meminjamkan dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sebagai lembaga keuangan bukan bank yang diusahakan oleh lembaga keuangan berbentuk koperasi, KSP mempunyai peluang yang cukup baik untuk rnengembangkan usahanya. Ini dapat terjadi apabila KSP mampu memanfaatkan peluang, baik peluang yang datang dari internal (kebutuhan anggota yang bersifat rutin) dan peluang eksternal (kebutuhan anggota bagi tambahan modal kerja/investasi sebagai dampak dari berkembangnya usaha anggota yang pada umumnya sebagai pengusaha dengan skala kecil. Eksistensi koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam pada koperasi akan terjamin apabila kinerja usaha yang ditunjukkan oleh pertumbuhan usaha yang didukung oleh adanya aturan kebijakan yang baik dan praktik-praktik yang sehat, dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomi dan usaha serta pendapatan anggota (*members promotion*)

2.1.2 Sumber-sumber Dana Koperasi

Sumber dana merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan koperasi simpan pinjam dalam rangka memenuhi kebutuhan dana para anggotanya. Bagi anggota koperasi yang kelebihan dana diharapkan untuk menyimpan dananya di

koperasi dan kemudian oleh koperasi dipinjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkan dana dan jika memungkinkan koperasi juga dapat meminjam dananya pada masyarakat luas.

Di samping itu juga memuat ketentuan untuk mengantisipasi prospek perkembangan di masa depan, dimana faktor permodalan bagi usaha anggota dan usaha koperasi sangat menentukan kelangsungan hidup koperasi dan usaha anggota yang bersangkutan. Dalam menjalankan kegiatan usaha, keberadaan modal sangat penting bagi koperasi. Karena tanpa modal koperasi tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya sehingga tidak akan mendapat keuntungan.

Setiap anggota koperasi diwajibkan untuk menyetor sejumlah uang sebagai sumbangan pokok anggota, disamping itu ditetapkan pula sumbangan wajib kepada para anggotanya. Kemudian sumber dana lainnya dapat diperoleh dari berbagai lembaga, baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta yang kelebihan dana.

Pembagian keuntungan diberikan kepada para anggotanya sangat tergantung kepada keaktifan para anggotanya dalam meminjamkan dana.

Menurut **Kasmir** dalam bukunya **”Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”** menyatakan bahwa secara umum sumber dana koperasi adalah menyatakan bahwa :

”1.Dari para angota koperasi berupa:

- **a. Iuran Wajib**
- **b. Iuran Pokok**
- **c. Iuran Sukarela**

2. Dari luar koperasi:

- **a. Badan Pemerintah**
- **b. Perbankkan**
- **c. Lembaga Swasta lainnya”**

(2007:271)

Modal merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara aktiva dengan kewajiban yang ada dan tidak merupakan ukuran nilai jual. Sedangkan penyaluran kredit merupakan salah satu pemanfaatan modal dalam bentuk penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak yang meminjamkan dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2.1.3 Keuntungan Koperasi

Keuntungan dari koperasi adalah bunga yang dibebankan kepada peminjam. Semakin banyak uang yang disalurkan akan memperbesar keuntungan koperasi. Disamping itu keuntungan lainnya adalah memperoleh biaya – biaya administrasi yang dibebankan kepada peminjam. Kemudian keuntungan juga dapat diperoleh dari hasil investasi lain yang dilakukan diluar kegiatan peminjaman, misalnya penempatan uang dalam bidang surat – surat berharga.

Pembagian keuntungan dalam koperasi simpan pinjam diberikan terutama bagi peminjam yang tidak pernah lalai dalam memenuhi kewajibannya. Keuntungan akan diberikan sesuai dengan jumlah yang dipinjam dalam suatu periode. Semakin besar pinjaman maka pembagian keuntungannya pun akan semakin besar pula, demikian pula sebaliknya.

Menurut **Kasmir** dalam bukunya **”Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”** menyatakan bahwa keuntungan dari koperasi adalah :

”1.Biaya bunga dibebankan pada peminjam

2.Biaya administrasi setiap kali transaksi

3.Hasil investasi diluar kegiatan operasi.”

(2007:273)

Setelah kita mengetahui keuntungan dari koperasi maka kita dapat mendirikan koperasi. Pendirian lembaga koperasi cukup sederhana yaitu hanya dengan minimal 20 orang yang membuat kesepakatan dengan akte notaris, kemudian didaftarkan di Kanwil Departemen Koperasi setempat untuk mendapatkan pengesahan. Dalam susunan organisasi koperasi rapat pengurus mengangkat pengurus dan pengawas. Sedangkan kegiatan sehari – hari diserahkan kepada pengelola koperasi. Dalam kegiatan koperasi simpan pinjam mengutamakan pemberian pinjaman kepada anggotanya dengan bunga yang relatif murah sekitar 12% per tahun. Besarnya pinjaman biasanya dibatasi sampai jumlah tertentu mengingat banyaknya anggota koperasi, sedangkan dana yang tersedia biasanya terbatas. Jika memang para anggota sudah tidak membutuhkan lagi dan dana masih lebih, maka tidak menutup kemungkinan koperasi memberikan pinjaman kepada bukan anggota koperasi.

2.2 Auditing

Auditing bukan merupakan cabang akuntansi, tetapi merupakan suatu disiplin bebas, yang mendasarkan diri pada hasil kegiatan akuntansi dan data kegiatan yang lain. Akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian transaksi keuangan perusahaan. Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dipakai oleh manajemen untuk mengukur dan menyampaikan data keuangan dan data kegiatan yang lain. Sedangkan *auditing* ditujukan untuk menentukan secara objektif keandalan informasi yang disampaikan oleh manajemen dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, *auditing* harus dilaksanakan oleh pihak yang bebas dari manajemen dan harus dapat diandalkan ditinjau dari sudut profesinya.

Auditing dilakukan karena di dalam menjalankan suatu perusahaan tidak terlepas dari adanya penyimpangan-penyimpangan yang kemungkinan dapat terjadi. Selain itu juga *auditing* dapat meminimalisasi adanya penyimpangan dan memaksimalkan berbagai aspek di dalam perusahaan yang dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan yang pada akhirnya akan memberikan nilai lebih bagi perusahaan baik dilihat dari sudut keuangan maupun non keuangan.

2.2.1 Pengertian *Auditing*

Audit secara umum adalah suatu proses pembangunan antara kondisi dengan kriteria kondisi atau kenyataaan yang sebenarnya, melekat pada objek yang diperiksa, sedangkan kriteria adalah hal yang seharusnya melekat pada objek yang diperiksa. Untuk lebih memahami arti audit secara umum, di bawah ini

dikemukakan pengertian audit menurut **Mulyadi** dalam bukunya yang berjudul "***Auditing"*** adalah sebagai berikut :

> **"Secara umum *auditing* adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan."**
>
> **(2002:9)**

Sedangkan pengertian *auditing* menurut **Arens, Elder** dan **Beasley** yang dialihbahasakan oleh **Tim Dejacarta** dalam bukunya ***"Auditing* dan Pelayanan Verifikasi**" adalah sebagai berikut:

> **"*Auditing* adalah pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilaksanakan oleh seseorang yang kompeten dan independensi."**
>
> **(2003:15)**

Dari kedua pengertian di atas, dapat dilihat bahwa tujuan audit adalah untuk menentukan apakah informasi yang dicatat telah mencerminkan secara wajar transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi selama satu periode akuntansi yang diperiksa sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam audit dikumpulkan bukti-bukti berupa informasi yang berkualitas yang digunakan dalam menunjang audit. Dalam melakukan audit, ruang lingkup pertanggungjawaban pemeriksa harus dinyatakan secara jelas.

Auditor harus mampu memiliki kemampuan dalam memahami kriteria yang digunakan beserta jenis dan jumlah bukti yang dikumpulkan agar pada akhir audit dapat ditarik kesimpulan yang tepat mengenai objek yang diperiksa. Selain

itu pemeriksa juga harus merupakan seorang yang independen, yang bebas dalam melakukan penilaian tanpa dipengaruhi oleh objek yang diperiksa.

Proses audit akan menjadi tidak berarti jika hasil audit tidak dikomunikasikan pada pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, proses pelaporan hasil audit juga memiliki peranan penting karena melalui pelaporan ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria yang telah ditetapkan dapat diketahui sehingga dapat dicari penyebabnya dan jika perlu dilakukan tindakan koreksi.

2.2.2 Jenis-jenis Audit

Sangatlah penting untuk memilih dengan teliti dan tepat keterangan/laporan yang mendukung dan menjadi bagian dari pelaksanaan pekerjaan audit. Diantaranya adalah pertimbangan yang memerlukan perhatian pada jenis-jenis audit.

Mulyadi dalam bukunya ***"Auditing"***, menggolongkan audit menjadi 3 golongan, yaitu :

> **"Auditing umumnya digolongkan menjadi 3 golongan :audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional."**
>
> **(2002:30)**

Dari pengertian di atas, dapat peneliti uraikan ketiga golongan audit sebagai berikut :

1. Audit laporan keuangan

   Audit atas laporan keuangan dilaksanakan untuk menentukan apakah seluruh laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (SAK). Hasil *auditing* terhadap laporan keuangan tersebut disajikan dalam bentuk tertulis berupa laporan audit yang selanjutnya dibagikan kepada para pengguna informasi keuangan, seperti pemegang saham, kreditur, dan Kantor Pelayanan Pajak.

2. Audit Kepatuhan

   Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan yang berlaku. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria.

3. Audit operasional

   Tujuan dari audit ini adalah untuk menilai kinerja, efisiensi dan efektivitas suatu bagian, fungsi, ataupun divisi suatu perusahaan. Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya audit tersebut.

Sedangkan berbagai jenis auditing menurut **Amin Widjaja Tunggal** dalam bukunya yang berjudul **"Audit Operasional (Suatu Pengantar)"** diungkapkan sebagai berikut :

> **"Terdapat tiga jenis utama *auditing* :**
> **1. *Attest* atau *financial auditing***
> **2. *Internal auditing* dan**
> **3. *Operations auditing*"**
>
> **(2006:3)**

Ketiga jenis *auditing* di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. *Attest* atau *financial auditing*

   Atestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai, dalam semua hal yang material, dengan kriteria yang telah ditetapkan. Asersi adalah

pernyataan yang dibuat oleh satu pihak dimaksudkan untuk digunakan pihak lain (pihak ketiga). Untuk laporan keuangan historis, asersi merupakan pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

2. *Internal auditing*

   Audit internal adalah suatu fungsi penilai independen yang dibentuk dalam organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatannya sebagai jasa bagi organisasi. Tujuannya untuk membantu anggota organisasi melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Ruang lingkup audit internal ini meliputi pemeriksaan dan evaluasi yang memadai serta efektivitas sistem pengendalian intern organisasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan.

3. *Operations auditing*

   Audit operasional menilai efektivitas dan efisiensi dari prosedur dan metode operasi. Karena dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah audit operasional, maka selanjutnya audit operasional akan lebih dijelaskan lagi.

2.3 Audit Operasional

Pemikiran mengenai penerapan audit operasional timbul dari adanya tuntutan dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, adanya kesenjangan antara hasil yang diinginkan dengan hasil yang diperoleh. Pelaksanaan audit operasional dalam hal ini bertujuan untuk memeriksa

kehematan, efisiensi, dan efektifitas kegiatan dan juga menilai apakah cara-cara yang diterapkan dalam kegiatan tersebut sudah berjalan dengan baik atau tidak. Selain itu juga audit operasional harus dilaksanakan untuk mengurangi terjadinya penyimpangan di dalam kegiatan operasional perusahaan.

Audit operasional perusahaan yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menguraikan hal-hal yang mencakup audit operasional.

2.3.1 Pengertian Audit Operasional

Istilah untuk audit operasional sampai saat ini masih belum disepakati secara luas jika dibandingkan dengan istilah audit laporan keuangan. Beberapa istilah sering digunakan, dimana istilah-istilah tersebut memiliki sinonim dengan audit operasional seperti audit kinerja, audit manajemen, atau audit efektivitas dan sebagainya.

Menurut **Guy, Alderman,** dan **Winter** dalam bukunya yang berjudul ***"Auditing"***, mengemukakan bahwa audit operasional adalah sebagai berikut :

> **"Audit operasional *(Operational Auditing)* merupakan penelaahan atas prosedur dan metode operasi entitas untuk menentukan tingkatt efisiensi dan efektivitasnya."**
>
> **(2003:419)**

Sedangkan menurut **Arens, Elder** dan **Beasley** yang dialih bahasakan oleh **Tim Dejacarta** dalam bukunya ***"Auditing* dan Pelayanan Verifikasi**" adalah sebagai berikut:

> **"Audit operasional adalah tinjauan atas bagian tertentu dari prosedur serta metode operasional organisasi tertentu yang bertujuan mengevaluasi efisiensi serta efektivitas prosedur serta metode tersebut."**
>
> **(2003:19)**

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa audit operasional merupakan suatu proses yang sistematis seperti dalam audit laporan keuangan, audit operasional mencakup serangkaian langkah atau prosedur yang terstruktur dan terorganisasi.

2.3.2 Manfaat dan Tujuan Audit Operasional

Adapun manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dengan dilaksanakannya audit operasional menurut **Amin Widjaja Tunggal** dalam bukunya **"Audit Operasional (Suatu Pengantar)"** mengemukakan manfaat dilaksanakannya audit operasional sebagai berikut:

> **"Suatu audit operasional yang dilakukan secara tepat harus memberikan manajemen sejumlah manfaat, mencakup:**
> 1. **Kemampulabaan yang meningkat**
> 2. **Alokasi sumber daya yang efisien**
> 3. **Identifikasi masalah pada tahap awal, dan**
> 4. **Komunikasi yang lebih baik."**
>
> **(2006:24)**

Tujuan audit operasional yang dikemukakan oleh **Mulyadi** dalam bukunya **"*Auditing*"** adalah sebagai berikut:

> **"Tujuan audit operasional adalah untuk :**
> **1. Mengevaluasi kinerja**
> **2. Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan**
> **3. Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut."**
>
> **(2002:32)**

Berdasarkan uraian diatas mengenai manfaat dan tujuan audit operasional di atas maka peneliti mengambil suatu pendapat bahwa dengan melaksanakan audit operasional diharapkan akan mampu menciptakan dan menjadikan aktivitas-aktivitas yang telah dilaksanakan perusahaan menjadi efektif dan efisien.

2.2.3 Tahap-tahap Audit Operasional

Mengingat sistem atau kegiatannya sekarang sudah sedemikian maju dan rumit maka dalam melakukan audit operasional perlu di tempuh tahap-tahap kerja. Dalam melaksanakan pekerjaan tanpa adanya tahap pekerjaan yang baik maka akan menimbulkan banyak kendala.

Tahap-tahap audit operasional menurut **Boynton, Johnson, dan Kell** yang dialihbahasakan oleh **Ichsan Setiyo Budi** dan **Herman Wibowo** dalam bukunya **"Modern *Auditing*"** menyebutkan tahap-tahap audit operasional terdiri dari:

> **"1. Memilih *Auditee***
> **2. Merencanakan audit**
> **3. Melaksanakan audit**
> **4. Melaporkan temuan**
> **5. Melakukan tindak lanjut"**
>
> **(2003:499)**

Berdasarkan tahap-tahap audit operasional di atas, peneliti dapat menjelaskan sebagai berikut :

1. Memilih *Auditee*

   Seperti pada banyak aktivitas lainnya dalam suatu entitas, auditing operational biasanya mengenai anggaran kehematan. Oleh karena itu, sumber daya untuk audit operasional harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Pemilihan auditee dimulai dengan studi (*survey*) pendahuluan terhadap calon-calon auditee dalam entitas untuk mengidentifikasi aktivitas yang mempunyai potensi audit tertinggi dilihat dari segi perbaikan efektivitas, efisiensi, dan kehematan operasi. Pada intinya, studi pendahuluan merupakan proses penyaringan yang akan menghasilkan peringkat dari calon auditee.

2. Merencanakan audit

   Perencanaan audit yang cermat sangat penting baik bagi efektivitas maupun efisiensi audit operasional. Landasan utama dari perencanaan audit adalah pengembangan program audit, yang harus dibuat sesuai dengan keadaan auditee yang ditemui pada tahap studi pendahuluan audit. Perencanaan audit juga mencakup pemilihan tim audit dan penjadwalan pekerjaan. Tim audit ini harus terdiri dari auditor yang memiliki keahlian teknis yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit. Pekerjaan harus dijadwalkan melalui konsultasi dengan auditee agar ada kerjasama dari personil *auditee* dalam audit.

3. Melaksanakan audit

   Dalam suatu audit operasional, auditor sangat mengandalkan pada pengajuan pertanyaan dan pengamatan. Pendekatan yang biasa dilakukan adalah

mengembangkan kuesioner untuk *auditee* dan menggunakannya sebagai dasar untuk mewawancarai personil *auditee*. Dari pengajuan pertanyaan, auditor berharap akan memperoleh pendapat, komentar, dan usulan tentang pemecahan masalah. Wawancara yang efektif sangat penting dalam audit operasional. Melalui pengamatan terhadap personil *auditee*, auditor akan dapat mendeteksi inefisiensi dan kondisi-kondisi lainnya yang ikut menyebabkan masalah ini.

4. Melaporkan temuan

   Audit operasional serupa dengan jenis-jenis auditing lainnya karena produk akhir dari audit ini adalah laporan audit. Akan tetapi, ada banyak situasi unik yang berkaitan dengan pelaporan dalam audit operasional. Laporan itu harus memuat suatu pernyataan tentang tujuan dan ruang lingkup audit, uraian umum mengenai pekerjaan yang dilakukan dalam audit, ikhtisar temuan-temuan, rekomendasi perbaikan, dan komentar auditee.

5. Melakukan tindak lanjut

   Tahap tindak lanjut (*follow-up phare*) dalam audit operasional adalah tahap bagi auditor untuk menindaklanjuti tanggapan auditee terhadap pelaporan audit. Idealnya, kebijakan entitas sebaiknya mengharuskan manajer unit yang diaudit untuk melaporkan secara tertulis selama periode waktu yang ditetapkan.

Dalam penelitian ini, tahap-tahap audit operasional yang digunakan adalah menurut **Arens, Elder dan Beasley** yang dialihbahasakan oleh **Tim Dejacarta** dalam bukunya **"*Auditing* dan Pelayanan Verifikasi"** adalah sebagai berikut:

> **"Ada tiga tahap dalam audit operasional: perencanaan, pengumpulan dan evaluasi bahan bukti, serta pelaporan dan tindak lanjut."**
>
> **(2006:503)**

Dari uraian di atas, masing-masing tahap audit operasional dijelaskan di bawah ini pada tiap sub bagian secara terpisah.

1. Perencanaan

Pada saat perencanan auditor menentukan ruang lingkup penugasan, menyampaikan hal itu ke unit organisasional, menentukan staf penugasan yang tepat, mendapatkan informasi mengenai latar belakang unit organisasi, memahami pengendalian intern, dan memutuskan bahan bukti yang tepat yang harus dikumpulkan.

Hal tersebut sesuai dengan ungkapan **Ikatan Akuntan Indonesia** dalam **Standar Profesional Akuntan Publik** yaitu sebagai berikut :

> **"Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan. Sifat, lingkup, dan saat perencanaan bervariasi dengan ukuran dan kompleksitas entitas, pengalaman mengenai entitas, dan pengetahuan tentang bisnis entitas."**
>
> **(2001:311.1)**

Dalam standar pertama dari *Generally Accepted Auditing Standard* (GAAS) - di Indonesia, SPAP - adalah perencanaan yang memadai. Hal ini dikutip oleh **Arens, Elder** dan **Beasley** yang dialihbahasakan oleh **Tim Dejacarta** dalam bukunya **"*Auditing* dan Pelayanan Verifikasi"** adalah sebagai berikut:

> **"Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya, dan jika menggunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya."**
>
> **(2003:288)**

Berdasarkan uraian di atas, tujuan utama dari perencanaan adalah memperoleh bukti yang cukup kompeten untuk kondisi yang ada dan membantu menjaga agar biaya audit yang dikeluarkan tetap wajar.

2. Pengumpulan dan Evaluasi Bahan Bukti

Auditor mengumpulkan berbagai bukti audit digunakan dalam pengambilan keputusan. Keputusan utama para auditor adalah menentukan jenis dan jumlah bukti audit yang tepat untuk dikumpulkan agar dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa berbagai komponen dalam laporan keuangan serta dalam keseluruhan laporan lainnya telah disajikan secara wajar.

Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh **Arens, Elder** dan **Beasley** yang dialihbahasakan oleh **Tim Dejacarta** dalam bukunya ***"Auditing* dan Pelayanan Verifikasi"** adalah sebagai berikut:

> **"Merupakan hal yang sangat penting untuk memperoleh sejumlah bukti audit yang cukup berkualitas agar dapat mencapai tujuan audit."**
>
> **(2003:16)**

Sedangkan menurut **Ikatan Akuntan Indonesia** dalam **Standar Profesional Akuntan Publik** menyatakan sebagai berikut :

> **"Auditor harus mempertimbangkan pengaruh gabungan dari berbagai tipe bukti audit yang ada kaitannya dengan suatu asersi dalam mengevaluasi tingkat keyakinan yang diberikan oleh bukti audit."**
>
> **(2001:319.21)**

Dari uraian di atas, auditor operasional harus mengumpulkan cukup bahan bukti kompeten agar dapat menjadi dasar yang layak guna menarik kesimpulan

mengenai tujuan yang sedang diuji. Setelah bahan bukti dikumpulkan, auditor memutuskan apakah audit layak dilakukan setiap tahun oleh auditor yang kompeten.

3. Pelaporan dan Tindak Lanjut

Pelaporan audit operasional biasanya dikirim hanya bagi pihak manajemen, dan satu salinan untuk unit yang diaudit. Pelaporan ini sering kali banyak memakan waktu agar temuan-temuan dan rekomendasi audit disampaikan secara jelas.

Menurut **Ikatan Akuntan Indonesia** dalam **Standar Profesional Akuntan Publik** menyatakan sebagai berikut :

> **"Setiap laporan yang diterbitkan mengenai kondisi yang dapat dilaporkan harus :**
> **a. Menunjukkan bahwa tujuan audit adalah untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan dan tidak untuk memberi keyakinan atas pengendalian intern.**
> **b. Memuat definisi kondisi yang dapat dilaporkan.**
> **c. Memuat pembatasan distribusi laporan."**
>
> **(2001:325.3)**

Sedangkan menurut **Arens, Elder** dan **Beasley** yang dialihbahasakan oleh **Ford Lumban Gaol** dalam bukunya **"*Auditing* dan Pelayanan Verifikasi"** mengungkapkan hal sebagai berikut:

> **"Tindak lanjut adalah umum dalam audit operasional bilamana rekomendasi dilakukan ke manajemen. Tujuannya adalah menentukan apakah perubahan yang direkomendasikan dilakukan, dan jika tidak, mengapa."**
>
> **(2006:505)**

Tidak adanya pihak ketiga, mengurangi akan kebutuhan pembakuan kata-kata dalam laporan audit operasional, keragaman audit operasional memerlukan

penyusunan secara khusus untuk menyajikan ruang lingkup audit, temuan, dan rekomendasi.

2.3.4 Keterbatasan Audit Operasional

Walaupun pemeriksaan operasional telah direncanakan dengan baik, namun pemeriksaan operasional ini memiliki berbagai keterbatasan. Menurut Amin Wijaya Tunggal dalam bukunya Manajemen operasionasuatu pengantar menyatakan bahwa keterbatasan operasional meliputi:

‘ 1. waktu

2. Keahlian Pemeriksaan Operasional

3. Biaya ‘

(2001 :25)

Keterbatasan pemerikasaan operasional tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Waktu

   Waktu adalah faktor yang sangat membatasi, karena pemerikasan harus memberikan informasi kepada manajemen dengan segera memecahkan masalah yang dihadapi. Karena itu penting kiranya diperhatikan bahwa pemeriksaan operasional perlu dilakukan secara teratur untuk menjamin bahwa permasalahan yang penting tidak menjadi kronis dalam perusahaan.

2. Keahlian Pemeriksaan Operasional

   Auditor dalam pemeriksaan operasional ini tidak mungkin menguasai berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan perusahaan. Auditor hanya lebih ahli dibidang pemeriksaan daripada operasi suatu perusahaan.

3. Biaya

Pemeriksaan operasional harus selalu ingat bahwa biaya juga merupakan batasan pekerjaan. Karenanya, biaya pemeriksaan itu sendiri harus lebih kecil dari pada jumlah uang yang berhasil dihemat.

2.4 Efektivitas

Ada berbagai macam pengertian mengenai efektivitas yang mempunyai arti yang sama meskipun pengungkapannya berbeda.

Menurut **Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Bealey** yang dialih bahasakan oleh **Ford Lumban Gaol** dalam bukunya **Auditing dan Pelayanan Verifikasi** pengertian efektivitas adalah :

"Efektivitas merujuk kepencapaian tujuan, sedangkan efisiensi mengacu ke sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu."

(2006:496)

Sedangkan menurut **Azhar Susanto** dalam bukunya **Sistem Informasi Akuntansi Konsep dan Pengembangan berbasis Komputer** adalah :

"Efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan satu atau beberapa tujuan telah dicapai."

(2004:100)

Dari kedua pendapat disimpulkan bahwa pengertian dari efektivitas adalah ukuran yang merujuk kepencapaian tujuan atau menunujukkan tujuan yang telah dicapai.

2.5 Kredit

Kredit mempunyai kedudukan yang istimewa, terutama pada negara yang sedang berkembang sebab antara volume permintaan akan dana jauh lebih besar dari penawaran dana yang ada di masyarakat. Selain itu pendapatan bunga dari kredit merupakan komponen yang dominan dibandingkan jasa-jasa perbankan lainnya

2.5.1 Pengertian Kredit

Kegiatan bank yang kedua setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan penyaluran dana ini disebut juga dengan istilah alokasi dana. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit.

Pengertian kredit menurut **Malayu S.P. Hasibuan** dalam buku "**Dasar-dasar Perbankan**" menyatakan bahwa :

> **"Kredit merupakan semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati".**
>
> **(2002:87)**

Sedangkan pengertian kredit menurut **Kasmir** dalam bukunya **"Dasar-dasar Perbankan"** adalah :

> "**Kredit adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan inbalan atau bagi hasil."**
>
> **(2004;102)**

Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Contoh berbentuk tagihan (kredit barang), misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kredit ini berarti nasabah tidak memperoleh uang tapi rumah atau mobil, karena bank langsung membayar ke *developer* dan nasabah hanya membayar cicilan rumah atau mobil tersebut setiap bulan. Kemudian adanya kesepakatan antara bank dengan nasabah penerima kredit, bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu dan bunga yang diterapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sangsi apabila sidebitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

2.5.2 Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian kredit oleh bank mempunyai fungsi dan tujuan tertentu. Tujuan dari pemberian kredit bagi bank adalah untuk mencari keuntungan, membentu nasabah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan stabilitas ekonomi. Sedangkan fungsi dari pemberian kredit itu sendiri untuk meningkatkan daya guna uang dan barang, mendorong dan mempelancar produksi dan konsumsi. Fungsi

dan tujuan bank ini pada akhirnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

2.5.2.1 Tujuan kredit

Pemberian kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tidak akan terlepas dari misi dari keinginan dari pemberian kredit.

Tujuan pemberian kredit menurut **Kasmir** dalam bukunya yang berjudul **”Dasar-dasar Perbankan”** adalah sebagai berikut :

> **”Tujuan pemberian kredit adalah untuk mencari keuntungan, membantu usaha nasabah dan membantu pemerintah.”**
>
> **(2005;105)**

Sedangkan Tujuan dari pemberian kredit menurut **Veithzal rivai** dalam bukunya **”Bank and Finacial Institutio”** mengatakan bahwa **:**

> **”Ada dua tujuan dari pemberian kredit yaitu profitability dan safety”**
>
> **(2006:237)**

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Dalam prakteknya tujuan pemberian kredit dalah sebagai berikut :

1. Mencari keuntungan

Pengertian Mencari Keuntungan menurut **Kasmir** dalam bukunya **”Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”** menyatakan bahwa :

> **”Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hal tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah.”**
>
> **(2007:96)**

Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, disamping itu keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank.

2. Membantu usaha nasabah

Pengertian Membantu Usaha Nasabah menurut **Kasmir** dalam bukunya **”Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”** menyatakan bahwa :

> ”**Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana modal kerja dengan dana tersebut maka pihak debitur bisa mengembangkan usaha nya.”**
>
> **(2007:96)**

3. Membantu pemerintah

Pengertian membantu pemerintah menurut **Kasmir** dalam bukunya **”Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”** menyatakan bahwa :

> ”**Semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.”**
>
> **(2007:96)**

Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan pemberian kredit oleh bank adalah :

1.Penerimaan pajak

2.Membuka kesempatan kerja

3.Meningkatkan jumlah barang dan jasa

4. Menghemat devisa negara terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabiala sudah dapat diproduksi didalam negri dengan fasilitas kredit jelas akan menghemat devisa negara.
5. Meningkatkan devisa negara untuk produk yang dihasilkan dari fasilitas kredit dan diekspor keluar negeri.

2.5.2.2 Fungsi Kredit

Tujuan pemberian kredit berbeda dengan fungsi kredit. Fungsi dari kredit yang diberikan kepada nasabah lebih melihat apa keinginan dan pemenuhan dari keinginan calon debitur, seperti yang dikemukakan sebagai berikut.

Fungsi kredit menurut **Rachmat Firdaus** dalam bukunya ”**Manajemen Perkreditan Bank Umum”** adalah :

> **”Fungsi kredit pada dasarnya adalah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan mempelancar produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi.”**
>
> **(2004;4)**

Adapun fungsi kredit secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Kredit pada hakekatnya dapat meningkatkan daya guna uang

a. Para pemilik uang/modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk meningkatkan usahanya.
b. Para pemilik uang/modal dapat menyimpan uang pada lembaga-lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya.

2. **Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang.**

   Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel sehingga akan dapat meningkatkan peredaran uang giral. Disamping itu, kredit perbankan yang dapat ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu-lintas uang akan berkembang pula.

3. **Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang**.

   Dengan mendapatkan kredit para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat.

   Disamping itu, kredit juga meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang dari satu tempat dan menjualnya ke tempat lain. Pembelian tersebut uangnya berasal dari kredit.

4. **Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.**

   Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan kepada usaha-usaha antara lain:

   a. Pengendalian inflasi

   a. Peningkatan ekspor, dan

   b. Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

6. **Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.**

   Setiap orang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha tersebut, namun adakalanya dibatasi oleh kemampuan dibidang permodalan. Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangmampuan pengusaha

dibidang permodalan tersebut, sehingga pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

7. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut. Dengan demikian mereka akan memperoleh pendapatan. Apabila perluasan usaha dan pendirian proyek-proyek baru telah selesai, maka untuk mengelolanya diperlukan tenaga kerja. Dengan tertampungnya tenaga-tenaga kerja tersebut, maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

8. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional.

Bank-bank besar di luar negri yang mempunyai jaringan usaha, dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Begitu pula negara yang telah maju mempunyai cadangan devisa dan tabungan yang tinggi, dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit kepada negara yang sedang berkembang untuk membangun. Bantuan dalam bentuk kredit ini tidak saja dapat mempererat hubungan ekonomi antar negara yang bersangkutan tetapi juga dapat meningkatkan hubungan internasional

2.5.3 Unsur-Unsur Kredit

Dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Sehingga jika kita membicarakan tentang kredit maka termasuk unsur-unsur yang ada di dalamnya. Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit menurut **Kasmir** dalam bukunya yang berjudul **"Dasar-dasar Perbankan"** adalah sebagai berikut :

> **"Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut : (1) Kepercayaan, (2) Kesepakatan, (3) Jangka Waktu, (4) Resiko, (5) Balas Jasa."**
>
> **(2005;104)**

Jadi dalam pemberian kredit terdapat lima unsur, yaitu:

1. **Kepercayaan**

   Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan. Oleh sebab itu sebelum kredit dikucurkan terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap permohonan kredit dari nasabah.

2. **Kesepakatan**

   Disamping unsur percaya di dalam kredit juga terdapat unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjin dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberiakan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (di bawah satu tahun), jangka menengah (satu sampai tiga tahun) dan jangka panjang (di atas tiga tahun).

4. Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagih. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit maka semakin besar pula resikonya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik yang disengaja oleh nasabah maupun yang tidak disengaja.

5. Balas Jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan yang diperoleh dari pemberian kredit.

2.5.4 Prinsip-prinsip Kredit

Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama pemberian kredit benar-benar terwujud sehingga kredit yang diberikan dapat mengenai sasaran dan terjaminan pengembalian kredit tersebut tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian.

Prinsip pemberian kredit menurut **Rachmat Firdaus** dalam bukunya ”**Manajemen Perkreditan Bank Umum”** adalah :

> **”Tiga macam konsep tentang prinsip pemberian kredit bank adalah sebagai berikut : prinsip-prinsip 5C, prinsip 5P dan prinsip 3R.”**
>
> **(2004;83)**

Jadi untuk menilai suatu kredit layak atau tidak diberikan, maka digunanakan prinsip 5C, 5P dan 3R. Prinsip-prinsip pemberian kredit tersebut adalah sebagai berikut :

Prinsip penialain kredit dengan 5C adalah sebagai berikut :

a. *Character*

Penilaian *character* nasabah merupakan masalah yang cukup kompleks karena berkaitan dengan watak dan prilaku seseorang baik secara individual maupun kelompok komunitas atau lingkungan usahanya. Pejabat penilai dalam melakukan penilaian karakter debitur perlu memperhatikan terutama sifat-sifat sebagai berikut: kejujuran, kecerdasan, ketulusan, kesehatan, kebiasaan-kebiasaan, temperamental, kaku, membanggakan diri secara berlebihan dan sebagainya. Informasi lain yang juga sangat perlu diketahui adalah apakah calon debitur tersebut masuk dalam Daftar Orang Tercela (DOT) atau daftar hitam.

b. *Capacity*

Capacity berkaitan dengan kemampuan peminjam mengelola usahanya secara sehat untuk kemudian memperoleh laba sesuai yang diperkirakan. Penilaian kemampuan tersebut perlu untuk mengetahui sejauh mana hasil usaha debitur

dapat membayar semua kewajibannya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit.

c. *Capital*

Penilaian modal dilakukan untuk melihat apakah debitur memiliki modal yang memadai untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. Semakin besar jumlah modal yang ditanamkan oleh debitur kedalam usaha yang akan dibiayai dengan dana bank semakin menunjukan keseriusan debitur dalam menjalankan usahanya tersebut.

d. *Collateral*

Penilaian barang jaminan yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit bank yang diperolehnya adalah untuk mengetahui sejauh mana nilai jaminan atau agunan tersebut dapat menutupi risiko kegagalan pengembalian kewajiban-kewajiban debitur.

e. *Condition of economy*

Berkaitan dengan keadaan ekonomi suatu saat yang secara langsung mempengaruhi kegiatan usaha debitur. Untuk meneliti kondisi ekonomi perlu diperhatikan.

Kemudian penilaian kredit dengan metode 5P adalah sebagai berikut :

1. *Party*

Yaitu mengkalasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

2. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Karena tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan.

3. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik.

4. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

5. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Selain dua prinsip di atas, ada pula prinsip 3R yaitu :

1. *Return/Returning* (hasil yang dicapai)

Return disini dimaksudkan penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh debitur setalah dibantu dengan kredit oleh bank. Persoalanya adalah apakah hasil tersebut dapat untuk menutup pinjaman serta bersamaan dengan itu memungkinkan pula usahanya terus berkembang atau tidak. *Return* disini

dapat pula diartikan keuntungan yang diperoleh oleh bank apabila memberikan kredit kepada pemohon.

2. ***Repayment*** **(pembayaran kembali)**

   Dalam hal ini bank harus menilai berapa lama calon debitur dapat membayar kembali pinjaman sesuai dengan kemampuan membeyar kembali dan apakah kredit harus diangsur atau dilunasi sekaligus diakhir periode.

3. ***Risk Bearing Ability*** **(kemampuan untuk menanggung resiko)**

   Dalam hal ini bank harus menilai sampai sejauh mana debitur mampu menanggung risiko kegagalan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

2.5.5 Jenis-jenis Kredit

Beragam jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan dan yang beragam menyebabkan jenis kredit juga menjadi beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah. Jenis-jenis kredit menurut **Kasmir** dalam bukunya yang berjudul **"Dasar-dasar Perbankan"** adalah sebagai berikut :

> **" Secara umum jenis kredit jika dilihat dari berbagai segi antara lain : dilihat dari segi kegunaan, dilihat dari segi tujuan kredit, dilihat dari segi jangka waktu, dilihat dari segi jaminan dan dilihat dari segi sektor usaha."**
>
> **(2005;109)**

Dari peryataan diatas dapat kita lihat jenis-jenis kredit menurut seginya adalah sebagai berikut :

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek pabrik baru untuk keperluan rehabilitas. Contoh kredit investasi adalah membangun pabrik. Masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama.

b. Kredit modal kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya adalah kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang.

b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh

kredit untuk perumahan, kredit modal pribadi, kredit perabotan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.

c. Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada suplier atau agen-agen perdaganagn yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan misalnya kredit peternakan ayam atau jiak untuk pertanian misalnya tanaman padi dan palawija.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk dan peternakan kambing.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yan masa pengembaliannya paling panjan. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsuftif seperti perumahan.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan charakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.

b. Kredit perternakan

Dalam hal ini unuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.

c. Kredit industri

Yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.

d. Kredit pertambangan

Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak dan timah.

e. Kredit pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit unuk para mahasiswa.

f. Kredit profesi

Diberikan kepada para profesional, seperti dosen, dokter atau pengacara.

g. Kredit perumahan

Yaitu kredit untuk membiayai pembanunan atau pembelian perumahan.

2.5.6 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tujuanya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai suatu kelayakan permohonan kredit. Prosedur pemberian kredit menurut **Rachmat Firdaus** dalam bukunya "**Manajemen Perkreditan Bank Umum"** adalah :

> **"Tahapan-tahapan dalam proses pemberian kredit bank adalah :**
> **1.Persiapan kredit**
> **2.Analisis kredit**
> **3.Keputusan Kredit**
> **4.Pelaksanaan dan administrasi kredit**
> **5.Supervisi kredit dan pembinaan debitur."**
>
> **(2004;91)**

Secara umum tahapan-tahapan/prosedur tehapan pemberian kredit adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan berkas-berkas

   Dalam hal ini calon debitur mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal.kemudian dilampirkan dengan berkas lain yang dibutuhkan.

   a. Pengajuan proposal hendaknya berisi

      1. Latar belakang perusahaan, seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, dan lain-lain.
      2. Maksud dan tujuan
      3. Besarnya kredit dan jangka waktu
      4. Cara pengembalian permohonan kredit
      5. Jaminan kredit

   b. Melampirkan dokumen yang meliputi foto kopi

      1. Akte notasris digunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT atau Yayasan.
      2. T.D.P (Tanda Daftar Perusahaan), merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
      3. N.P.W.P (Nomor Pokok Wajib Pajak)
      4. Neraca dan laporan laba rugi tiga tahun terakhir
      5. Bukti diri dari pimpinan perusahaan
      6. Foto kopi dan sertifikat jaminan

2. Penyidikan berkas pinjaman

   Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3. Wawancara awal

   Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuanya adalah untuk menyakinkan bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang diinginkan bank.

4. *On the Spot*

   Merupakan kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan meninjau bebagai obyek yang dijadikan usaha atau jaminan.kemudian hasilnya dicocockan dengan hasil wawancara I.

5. Wawancara II

   Merupakan kegiatan perbaikan berkas-berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan.

6. Keputusan kredit

   Keputusan kredit dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapakan administrasinya dan jika ditolak maka dikirimkan surat penolakannya sesuai dengan alasan.

7. Penandatanganan perjanjian kredit

   Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatangan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau dengan melalui notaries.

8. Realisasi kredit

   Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran kredit

   Merupakan pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu secara sekaligus atau secara bertahap.

2.5.7 Aspek –aspek penilaian kredit

Disamping prinsip dan konsep penilaian kredit, maka dalam melakukan analisis kredit sangat penting melakukan penilaian terhadap aspek-aspek yang menyangkut kegiatan usaha calon debitur yaitu :

1. Aspek Pemasaran

   Penilaian yang dilakukan perbankan disini adalah menyangkut daya beli masyarakat (*purchasing power*), kompetisi, pangsa pasar, kualitas produksi, dan sebaginya. Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi perkembangan

usaha debitur. Analisa pemasaran perlu dilakukan untuk melihat kondisi pasar saat ini, meliputi jumlah penawaran yang sudah ada untuk jenis produk yang direncanakan peminjam dan kemampuan pasar untuk menyerap produk debitur. Demikian pula prospek pemasaran perlu diperlihatkan perkembangan permintaan di masa yang akan datang.

2. Aspek teknis

   Penilaian terhadap aspek teknis ini meliputi kelancaran produksi, kapasitas produksi, mesin-mesin dan peralatan, ketersidiaan dan kontinuitas bahan baku. Disamping itu kualitas tenaga kerja yang dimiliki fasilitas teknis yang ada cukup mempengaruhi penilaian aspek teknis.

3. Aspek Manjemen

   Dalam penilaian aspek ini, perlu diperhatikan stuktur organisasi dan angota-angota manajemen termasuk kemampuan dan pengalamannya serta pola kepemimpinanya yang diterapakan oleh top manajemen. Perlu diperhatikan apakah pengelolaan dan kepengurusan perusahaan ada tanda *one men slow manajement*.

   a. Aspek Yuridis

      Penilaian aspek ini antara lain meliputi status hukum badan usaha misalnya akte pendirian yang telah disahkan oleh pihak yamng berwenang, legalitas usaha meliputi kelengkapan ijin usaha dan yang cukup penting adalah bagaimana legalitas baran-barang jaminan yaitu kepemilikannya harus didukung dengan dokumen yang sah dan dalam pengusaan calon debitur.

b. Aspek Sosial Ekonomi

Penilaian aspek ini pada dasarnya untuk mengetahui apakah usaha yang akan dibiayai dengan kredit tersebnut diterima atau memberi dampak positif atau negatif terhadap lingkungan masyarakat setempat. Sehubungan itu perlu diperhatikan apakah proyek tersebut mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat atau mungkin bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan agama masyarakat setempat.

c. Aspek financial

Penilaian aspek keuangan ini meliputi keadaan keuangan perusahaan dibitur yang akan dibiayai. Untuk melakuakn penilaian keuangannya perlu diperoleh data-data mengenai laporan keuangan, arus dana, realisasi, produksi, realisasi produksi, pembelian dan penjualan.

2.6 Hubungan Audit Operasional dengan efektivitas tujuan pemberian kredit

Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk kredit. Masalah utama yang dihadapi adalah ketergantungannya yang besar terhadap pengembalian sejumlah uang dari nasabah yang dipinjam secara kredit. Maka dibutuhkan suatu audit operasional yang memadai dalam menilai kegiatan pemberian kreditnya.

Hubungan audit operasional dengan tujuan pemberian kredit menurut **S.Munawir** dalam bukunya "**Analisis Laporan keuangan"** adalah :

> **"Cara yang umum diterima untuk meneliti keadaan keuangan seorang nasabah, ialah dengan jalan memperoleh neraca,laporan rugi-laba dan keterangan-keterangan lainnya, sebaiknya diusahakan agar diperoleh laporan yang sudah diaudit, karena auditor dapat memberikan pandangan untuk masalah kredit."**
>
> **(1990:237)**

Jadi hubungan audit operasional terhadap efektivitas tujuan pemberian kredit adalah penilaian yang sistematik dan menyeluruh terhadap suatu kegiatan operasi dari pemberian kredit. Tujuan utama dari dilakukannya audit terhadap tujuan pemberian kredit adalah untuk meyakinkan telah adanya pengendalian yang memadai terhadap tujuan pemberian kredit. Dalam proses audit kemampuan maupun kelemahan dari suatu proses perlu diidentifikasikan, kemampuan mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut, sedangkan kelemahan masih bisa diperbaiki.